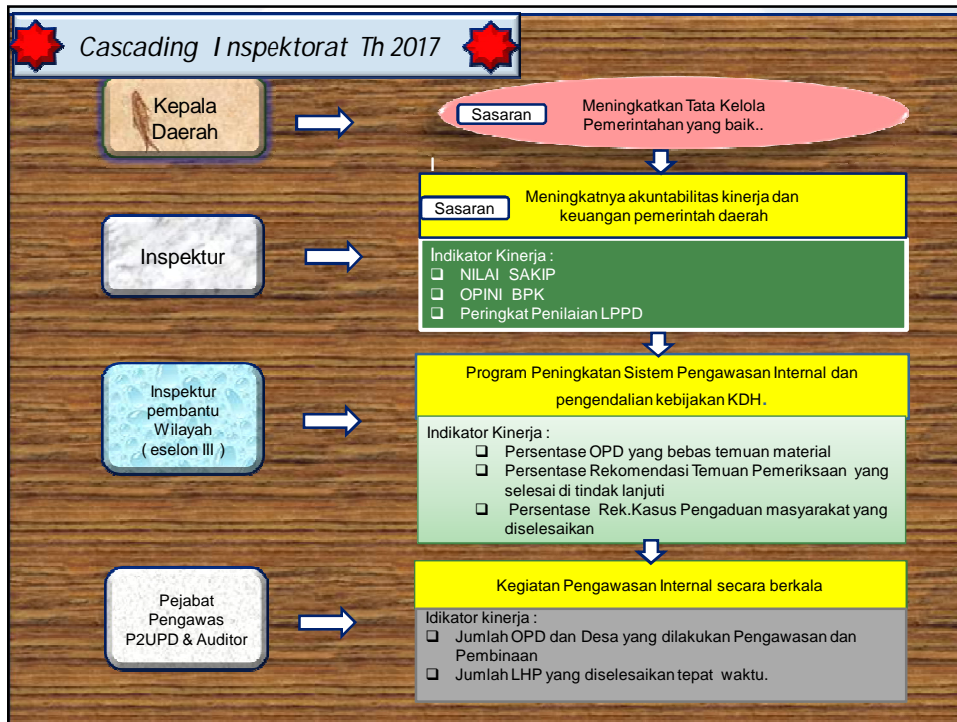


| -INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| SASARAN | INDIKATOR | TARGET KINERJA TAHUN KE- | | | | | |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintah daerah | <input type="checkbox"/> Nilai SAKIP | C | CC | B | BB | A | A |
| | <input type="checkbox"/> OPINI BPK | WDP | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP |
| | <input type="checkbox"/> Peringkat penilaian LPPD | 36 besar | 30 besar | 30 besar | 20 besar | 20 besar | 10 besar |



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BITAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. TOTOK SUBIHANDONO, MSi**
Jabatan : **Inspektur Daerah Kabupaten Bitar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. RIJANTO, MM**
Jabatan : **Dupai Besar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebenaran dan kepastian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan persiapan re dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan penghapusan dan nilai.

Bitar, 2 Februari 2017

Pihak Pertama

Drs. TOTOK SUBIHANDONO, MSi
Penerima Utama Mutasi
N.P. 19627810 196203 1 009

**Lampiran Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten 2017**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|---------------------|
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah | <input type="checkbox"/> Persentase NILAI SAKIP <input type="checkbox"/> Opini BPK <input type="checkbox"/> Peringkat penilaian LPPD se Jawa Timur. | CC WDP 30 bsr |

| No | Program | Anggaran | Keuangan |
|----|---|------------------|----------|
| 1 | Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | R. 4.393.098.800 | APBD |

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BITAR**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. RIJANTO, MM**
Jabatan : **Dupai Besar**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. TOTOK SUBIHANDONO, MSi**
Jabatan : **Inspektur Daerah Kabupaten Bitar**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang selarasnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebenaran dan kepastian pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan persiapan re dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka perbaikan penghapusan dan nilai.

Bitar, 2 Februari 2017

Pihak Kedua

Drs. RIJANTO, MM
Penerima Utama Mutasi
N.P. 19627810 196203 1 009

**Lampiran Perjanjian Kinerja
Inspektorat Kabupaten Bitar 2017**

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|----|---|---|---------------------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah | <input type="checkbox"/> Persentase NILAI SAKIP <input type="checkbox"/> Opini BPK <input type="checkbox"/> Peringkat penilaian LPPD se Jawa Timur. | CC WDP 30 bsr |

| No | Program | Anggaran (Rp) | Keuangan |
|----|---|------------------|----------|
| 1 | Program peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH | R. 4.393.098.800 | APBD |



Peraturan Bupati Blitar Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar

BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 21 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR
BUPATI BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai ketercapaian capaian kinerja organisasi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atau Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar;

3) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

B. PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL EVALUASI

6. Kumpulan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar yang dilakukan oleh tim evaluator disampaikan kepada Bupati.

7. Hasil evaluasi laporan kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar selanjutnya disampaikan Bupati kepada SKPD yang bersangkutan dengan tembusan kepada:

- Ministeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- Ministeri Dalam Negeri.

BAB V
PENUTUP

A. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Kebijakan evaluasi, termasuk ketentuan laporan kinerja merupakan bagian dari siklus manajemen yang tidak terlepas dari perubahan paradigma baru dalam manajemen pemerintahan terutama melalui manajemen kinerja yang berorientasi hasil;
- Harus dapat mencapai tujuan tersebut, para penyelenggara evaluasi harus mengembangkan keahlian profesionalnya, termasuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang manajemen pemerintahan dan auditing, agar dapat memberikan sumbuhan yang berarti untuk perbaikan kinerja instansi pemerintah.


12

2

| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH YANG DILAKUKAN INSPEKTORAT DAERAH TERHADAP 15 OPD SAMPLING | | | | | | |
|--|---|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| No | OPD | Th. Evaluasi | Nilai | | Grade | |
| | | | Nilai | Setelah TL | Grade | Setelah TL |
| 1 | INSPEKTORAT | 2016 | 52,06 | 73,21 | CC | BB |
| 2 | DINKES | 2016 | 61,38 | | B | |
| 3 | BKPSDM | 2016 | 60,29 | | B | |
| 4 | SATPOL PP | 2016 | 60,38 | | B | |
| 5 | DINAS PERTANIAN | 2016 | 50,91 | | CC | |
| 6 | Dinas PU Perumahan &Kawasan Pemukiman | 2016 | 39,07 | | C | |
| 7 | Dinas PU PR | 2016 | 46,94 | | C | |
| 8 | DINDAMADE | 2016 | 45,00 | | C | |
| 9 | DINAS SOSIAL | 2016 | 40,12 | | C | |
| 10 | DINAS PENDIDIKAN | 2016 | 32,00 | | C | |

| LanjutanLanjutan | | | | | | |
|------------------|---|----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| No | OPD | Th Evaluasi | Nilai | | Grade | |
| | | | Nilai | Sesudah TL | Grade | Sesudah TL |
| 11 | BPKAD | 2016 | 42,79 | 61,04 | C | B |
| 12 | DINAS PENDAPATAN | 2016 | 49,24 | | C | |
| 13 | BAPPEDA | 2016 | - | - | BB | - |
| 14 | DINAS KOPERASI&UMKM | 2016 | - | - | D | - |
| 15 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2016 | - | - | B | - |
| | Inspektorat | | 52,06 | 60,41 | CC | B |

LAPORAN HASIL REVIU



**PEMERINTAH KABUPATEN BITAR
INSPEKTORAT**
Jl. A. Yani No. 44 Telp. (0422) 801922-801276
Jember Bitar 66112
Email: inspektur@bitar.go.id

Bitar, 9 Agustus 2016

| | |
|---|--------------------------|
| Nomor : 700/487/409/207/2016 | Kepada : Kepala |
| Sifat : Segera | Yth. Plt. Kepala BAPPEDA |
| Lampiran : | Di : |
| Perihal : Hasil Reviu Rancangan Akhiv Dokumen RPJMD Tahun 2016 - 2021 Kabupaten Bitar | BITAR |


Mendaklajuti surat undangan Nomor : 050/488-080/201/2016 Perihal : pengisian akhiv dokumen RPJMD Kab. Bitar 2016-2021. AMI, bahwa kami telah melakukan reviu terhadap dokumen RPJMD Kabupaten Bitar tahun 2016-2021.

- 5) Keselarasan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RPJMN, agenda pembangunan nasional sudah diuraikan kebijakan umum dan program pembangunan daerah
- 6) Keterlaksanaan dan kesesuaian antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJPD sudah cukup sesuai

REKOMENDASI :
Kepada Tim Penyusun RPJMD:

1. Disarankan untuk mematuhi tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD serta melengkapi dokumen untuk penyusunan RPJMD
2. Melakukan perbaikan untuk sinkronisasi, koherensi dan kesesuaian antar bagian dokumen perencanaan dan antar jenis dokumen perencanaan, pada:
 - a. Program dengan Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan Strategi dalam Dokumen RPJMD
 - b. Antar Bab dalam Dokumen RPJMD

Bitar, 7 April 2017
Inspektur Kabupaten Bitar,
M. TOTOK SUBIHANDONO, M.S.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 199203 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BITAR
INSPEKTORAT DAERAH**
Jalan Sudanco Supriyadi No 17 Kode Pos 66112 BLITAR
Telepon (0342) 801925

NOTA DINAS

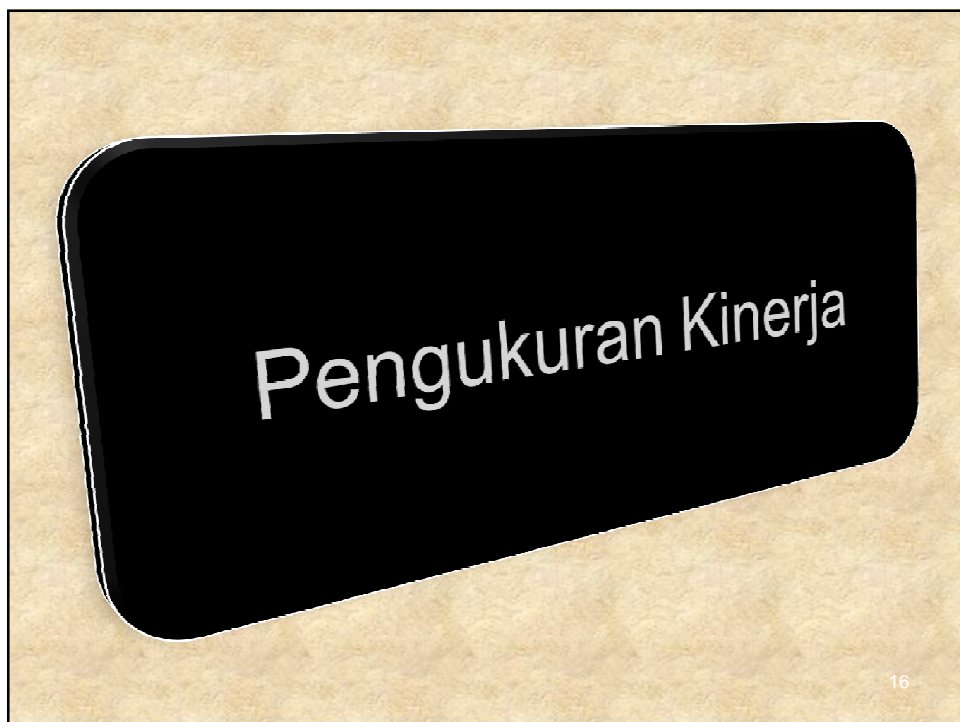
| | |
|--|---|
| Kepada : Bpk. Bupati Bitar | Dari : Inspektur Kab. Bitar |
| Tanggal : 7 April 2017 | Nomor : 700/281/409/207/2017 |
| Sifat : Biasa | Lampiran : 1 (satu) bendel Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bitar Tahun 2016 |
| Perihal : Hasil Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bitar Tahun 2016 | |

- 3) Tidak ada perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 1 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dikarenakan tahun pertama dari RPJMD
- 4) LKIP belum menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja namun telah menyajikan alternatif solusi yang telah dilakukan.
- 5) Telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
- 6) Tidak menyajikan analisis program/kegiatan yang menurunkan keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
- f. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran, teruji dalam Lampiran 6.
- g. IKU dan IK telah SMART, teruji dalam Lampiran 6.

IX. Apresiasi
Inspektoriat Kabupaten Bitar mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bitar Tahun 2016.

11 Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhiv RPJMD Kabupaten Bitar Tahun 2016-2021 Inspektoriat Kabupaten Bitar 2016

12 Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bitar Tahun 2016



| Pencapaian Kinerja terhadap pelaksanaan program kerja PKPT 2016 | | | | |
|---|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| No | Uraian | Satuan | Tahun | |
| | | | 2015 | 2016 |
| 1 | Penurunan tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan daerah pada OPD dan Desa. - Potensi Kerugian negara/daerah - Temuan Administrasi - Temuan 3 E. | ▪ Jumlah Temuan | 62 kasus 536 Kasus 93 Kasus | 51 Kasus 278 Kasus 66 Kasus |
| | Jumlah | | 691 Kasus | 395 Kasus |
| | Terjadi penurunan tingkat pelanggaran : <input type="checkbox"/> Potensi Kerugian Negara/Daerah sebesar 82,25 % <input type="checkbox"/> Temuan administrasi sebesar 51,86% <input type="checkbox"/> Temuan 3 E sebesar 70,96% | | | |

| PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-----------|---------|---------------------|-----------|---------|
| Program | Indikator | Pencapaian Kinerja | | | Pencapaian Anggaran | | |
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian |
| Peningkatan Sistem pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH. | Persentase OPD yang bebas temuan material | 60% | 70,13% | 116,88 | 2.154. | 1.893. | 87,88 % |
| | Persentase Kasus pengaduan Masyarakat yang tertangani. | 100% | 100 % | 100% | 641 jt | 488 jt | 75,92% |
| Upaya untuk menaikkan target dari 60 % ditahun 2016 menjadi 80 % ditahun 2017 dengan cara : | | | | | | | |
| 1. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif terus menerus. | | | | | | | |
| 2. Melakukan Monev Pengawasan. | | | | | | | |
| 3. Melakukan Konseling terhadap obrik | | | | | | | |
| 4. Memberikan Early Warning system | | | | | | | |

| Pencapaian Sasaran IKU 2017 | | | | | |
|--|---|--|----------|---------------------|---|
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | % |
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan Pemerintah daerah | <input type="checkbox"/> Nilai SAKIP | CC | Belum ada nilai | |
| | | <input type="checkbox"/> Opini BPK | WDP | WTP | |
| | | <input type="checkbox"/> Peringkat Penilaian LPPD se Jatim | 30 besar | Belum ada peringkat | |
| Upaya Pencapaian : 1. Melakukan Evaluasi terhadap SAKIP seluruh OPD dengan target nilai minimal " B " 2. Memferivikasi Aset seluruh OPD dan melakukan fokus Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan,SPJ dan Pembangunan Fisisk seta melakukan PDTT (Pengawasan dengan Tujuan Tertentu). 3. Melakukan Koordinasi dengan Bagian pemerintahan untuk Laporan LPPD agar mencapai peringkat yang diharapkan. | | | | | |

19

| RENCANA KINERJA | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-------------|--|------|-----------|-----------|-------------|
| 2017 | 2018 | | | | | | | | |
| Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Akuntailitas keuangan pemerintah daerah Indikator Sasaran ; <input type="checkbox"/> Nilai SAKIP <input type="checkbox"/> Opini BPK <input type="checkbox"/> Peringkat penilaian LPPD | Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan Akuntailitas keuangan pemerintah daerah Indikator sasaran : <input type="checkbox"/> Nilai SAKIP <input type="checkbox"/> Opini BPK <input type="checkbox"/> Peringkat LPPD. | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><th>2017</th></tr> <tr><td>1 Sasaran</td></tr> <tr><td>1 Program</td></tr> <tr><td>21 Kegiatan</td></tr> </table> | 2017 | 1 Sasaran | 1 Program | 21 Kegiatan | <table border="1"> <tr><th>2018</th></tr> <tr><td>1 Sasaran</td></tr> <tr><td>1 Program</td></tr> <tr><td>19 Kegiatan</td></tr> </table> | 2018 | 1 Sasaran | 1 Program | 19 Kegiatan |
| 2017 | | | | | | | | | |
| 1 Sasaran | | | | | | | | | |
| 1 Program | | | | | | | | | |
| 21 Kegiatan | | | | | | | | | |
| 2018 | | | | | | | | | |
| 1 Sasaran | | | | | | | | | |
| 1 Program | | | | | | | | | |
| 19 Kegiatan | | | | | | | | | |

20

| RENCANA AKSI KINERJA 2018 | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--------------------|----|-----|----|--|--|-------------------------------------|-----------|
| No | Aksi Kegiatan | Jadwal Pelaksanaan | | | | Out Put/Keluaran | Program | Kegiatan | Pendanaan |
| | | I | II | III | IV | | | | |
| 1 | Melakukan pengawasan pada OPD dan Desa dengan fokus terhadap Aset dan pembangunan fisik dan melakukan PDTT | √ | √ | √ | √ | 1. Penurunan tingkat pelanggaran pengelolaan keuangan, aset dan pembangunan fisik oleh OPD di Kabupaten Blitar.. | Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH. | Pengawasan Internal secara berkala. | |
| 2 | Melaksanakan evaluasi SAKIP seluruh OPD | √ | √ | √ | | Jumlah OPD yang dievaluasi Laporan Kinerja. Dengan nilai LAKIP "B" | Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH. | Evaluasi LAKIP OPD. | |
| 3 | Peningkatan SDM (Kapabilitas APIP) | √ | √ | √ | √ | Pengawas/ Auditor yang bersertifikat | Peningkatan sistem pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH. | Pendidikan dan pelatihan | 21 |

| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | | FORMULIR RKA SKPD.2.2.1 |
|----------------------------|---|-------------------------|
| Urusan | : 4.02 Urusan pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan | |
| Organisasi | : 4.02.4.02.01 Inspektorat | |
| Program | : 4.02.4.02.01.20. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian kebijakan KDH. | |
| Kegiatan | : 4.02.4.02.01.20 Pengawasan Urusan pemerintahan Desa | |
| Lokasi | :Kabupaten Blitar | |
| Sumber Dana | | |
| Jumlah | Indikator Program | |
| Capaian Program | Terselesainya Laporan Hasil Pengawasan | Indikator Kegiatan |
| Masukan | Persentase Desa yang diadakan Pengawasan | Target Kinerja |
| Keluaran | Jumlah Dana | Rp. 1,335 |
| Hasil | Jumlah Desa yang diadakan pembinaan dan pengawasan | Indikator Hasil |
| | Persentase LHP yang diterbitkan | 100% |



**KUNCI KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
TIDAK TERLEPAS DARI**

**KOMITMEN BERSAMA
DARI SELURUH PIMPINAN OPD**

23

TERIMA KASIH



What Is Clearly Defined?
Goals? Objectives?
Plan?
Mission?

ACHIEVEMENT

24